

# Kritik atas Interdependensi Kompleks: Studi Kasus Perang Dagang AS–Tiongkok di Era Kepemimpinan Donald Trump

Fauzan Akbar Wicaksana  
Nur Luthfi Hidayatullah

UIN Sunan Ampel Surabaya  
Indonesia

e-mail: [fauzanakbarwicaksana77@gmail.com](mailto:fauzanakbarwicaksana77@gmail.com)  
[nur.luthfi.hidayatullah@uinsa.ac.id](mailto:nur.luthfi.hidayatullah@uinsa.ac.id)

## ABSTRACT

*This study examines the paradox of economic interdependence between the United States and China in the context of the trade war that began in 2018. Despite having deep and complex economic ties, the two great powers engaged in escalating conflict involving retaliatory tariffs, technology export restrictions, and sanctions on strategic companies. This paradox challenges the assumptions of complex interdependence theory, which stated that mutual economic dependence reduces the likelihood of conflict. This research uses a qualitative descriptive method with a case study approach, employing complex interdependence theory by Keohane and Nye as the main analytical framework, and expands the analysis using weaponized interdependence by Farrell and Newman. The findings show that economic interdependence does not always foster cooperation—especially when there are structural asymmetries in global networks. The United States, as the dominant actor in key financial and technological infrastructures, effectively weaponized interdependence to exert coercive pressure on China through mechanisms such as the chokepoint effect and panopticon effect. Based on these findings, the study proposes a new conceptual framework called coercive complex interdependence, which explains how interdependent relationships can be strategically manipulated by powerful states to achieve geopolitical objectives. This research contributes to the development of international relations theory by offering a more realistic understanding of power dynamics in an increasingly interconnected, yet strategically competitive global environment.*

**Kata Kunci:** *Complex interdependence, Trade War, United States, China, Donald Trump.*

*Penelitian ini membahas paradoks dalam hubungan interdependensi ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, khususnya dalam konteks perang dagang sejak 2018. Meskipun kedua negara adidaya memiliki tingkat ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi, konflik tetap terjadi dalam bentuk tarif balasan, pembatasan ekspor teknologi, dan sanksi terhadap perusahaan strategis. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan teori interdependensi kompleks dalam menjelaskan realitas kontemporer, karena teori tersebut mengasumsikan bahwa saling ketergantungan akan menurunkan potensi konflik antar negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan analisis konseptual terhadap teori complex interdependence Keohane dan Nye, dan weaponized interdependence Farrell dan Newman. Temuan menunjukkan bahwa ketimpangan dalam struktur jaringan global telah memberikan negara dominan, seperti Amerika Serikat, kemampuan untuk menggunakan ketergantungan sebagai alat koersif. Konsep panopticon effect dan chokepoint effect menjelaskan bagaimana Amerika Serikat memanfaatkan posisi sentralnya dalam sistem keuangan dan teknologi global untuk membatasi akses dan mengawasi lawan strategisnya. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan pembaruan konseptual melalui*

*kerangka coercive complex interdependence, yaitu pemahaman bahwa interdependensi yang kompleks juga dapat dimanfaatkan secara koersif oleh negara yang memiliki kontrol atas simpul-simpul penting dalam jaringan global. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian hubungan internasional, khususnya dalam memahami dinamika kekuasaan di era globalisasi dan rivalitas antara kekuatan besar.*

**Keywords: Interdependensi Kompleks, Weaponized Interdependence, Perang Dagang, Amerika Serikat, Tiongkok, Donald Trump.**

## Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi keterbatasan teori interdependensi kompleks yang dikembangkan oleh Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye dalam menjelaskan dinamika konflik ekonomi kontemporer. Namun sebelum itu perlu kita ketahui, bahwa konflik merupakan suatu bentuk ketegangan atau perselisihan yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak atau bahkan lebih. Dalam konteks Hubungan Internasional, konflik tidak selalu bersifat militer. Namun, konflik juga dapat terjadi dibidang politik, sosial hingga ekonomi. Konflik muncul karena berbagai faktor, seperti perbedaan ideologi, ketimpangan kekuasaan, persaingan sumber daya, dan kelemahan negara dalam menangani keluhan masyarakat. Maka dari itu, dalam Hubungan Internasional konflik merupakan aspek yang tidak akan pernah bisa dipisahkan karena merupakan bagian dinamika antar negara (Bharadwaj, (December 2022).

<b>Jenis Konflik</b>	<b>Faktor-faktor penyebab</b>
Perbedaan ideologi	Perbedaan sistem pemerintahan atau nilai yang menyebabkan pertentangan antar negara atau kelompok
Ketimpangan kekuasaan	Ketidakeimbangan dalam struktur internasional yang menciptakan perebutan pengaruh atau dominasi
Persaingan sumber daya	Persaingan terhadap akses ekonomi, energi, wilayah, atau sumber daya alam
Kelemahan negara	Negara yang gagal menyalurkan aspirasi warganya rentan terhadap konflik domestik maupun internasional
Identitas etnis/agama	Konflik sering muncul karena perbedaan identitas kolektif yang memicu diskriminasi atau eksklusivitas sosial

**Tabel 1. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik (Bharadwaj, (December 2022)**

Salah satu bentuk konflik yang berkembang dalam dunia modern saat ini adalah perang dagang. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah apakah perang dagang dapat dikategorikan sebagai bentuk konflik dalam hubungan internasional? Dalam buku *Trade war: The Clash of Economic Systems Endgagering Global Prosperity* oleh Crowley, disebutkan bahwa perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok telah merusak aturan lama dalam kerja sama perdagangan internasional. Para pembuat kebijakan telah memberlakukan tarif terhadap ratusan miliar dolar barang dagangan, mengganggu jaringan perdagangan global, dan merugikan perekonomian mereka sendiri. Dari

penjelasan tersebut dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa perang dagang AS–Tiongkok dapat dikategorikan sebagai konflik ekonomi internasional, dengan bentuk, dampak, dan eskalasi yang sebanding dengan konflik geopolitik lainnya (Crowley, 2019).

Perlu diketahui bahwa hubungan resmi antara Amerika Serikat dan Tiongkok bermula pada 1 Januari 1979, ketika kedua negara menormalisasi hubungan diplomatik melalui kesepakatan yang juga mencakup pengakuan AS terhadap prinsip "*One China Policy*." Pada saat yang sama, Tiongkok di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping mulai membuka ekonominya melalui kebijakan reformasi dan keterbukaan (*Gaige Kaifang*), yang mendorong integrasi lebih dalam ke dalam sistem perdagangan global. Tidak lama kemudian, bergabungnya Tiongkok ke dalam World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001 membuat hubungan ekonomi bilateral antara AS dan Tiongkok berkembang pesat, dengan perdagangan dua arah yang mencapai triliunan dolar pertahunnya, dan investasi besar-besaran dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di sektor manufaktur negara Tiongkok tersebut. Hubungan ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang mendalam di antara kedua negara. Namun, sejak tahun 2018, hubungan ekonomi tersebut berubah drastis menjadi arena konflik terbuka, dimulai dengan kebijakan tarif besar-besaran yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap produk-produk asal Tiongkok. Alih-alih mengurangi ketegangan, perang dagang ini berlanjut dan bahkan mengalami intensifikasi di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, meskipun dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terfokus pada sektor teknologi strategis. Fenomena ini memperlihatkan adanya paradoks dalam asumsi dasar teori interdependensi, yang beranggapan bahwa saling ketergantungan ekonomi akan menurunkan kemungkinan konflik antar negara (Dehn, 2020).

Lalu menurut Putri, dalam karyanya yang berjudul "*The Role of the World Trade Organization (WTO) on the Impact of the China-United States Trade War on International Trade*," juga mengatakan bahwa perang dagang antara AS-Tiongkok juga digambarkan sebagai bentuk konflik ekonomi yang terjadi ketika kedua negara saling mengenakan tarif dan hambatan perdagangan sebagai bentuk saling balas atas kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. (Putri, 2024) Dalam konteks hubungan internasional, perang dagang dianggap sebagai salah satu bentuk "*soft conflict*" atau konflik lunak yang terjadi dalam sistem internasional dan memiliki dampak yang luas terhadap negara lain. Sehingga, dapat disimpulkan berdasarkan penjabaran tersebut bahwa perang dagang yang terjadi antara Amerika– Tiongkok merupakan sebuah konflik.

<b>Faktor/Unsur</b>	<b>Deskripsi Perang Dagang AS–Tiongkok</b>	<b>Kesesuaian dengan Elemen Konflik</b>
1. Pertentangan Kepentingan	AS ingin mengurangi defisit neraca perdagangan; Tiongkok ingin mempertahankan pasar dan teknologinya	Ada konflik kepentingan ekonomi dan strategis
2. Tindakan Saling Merugikan	Saling menaikkan tarif, pembatasan teknologi, dan larangan impor/ekspor tertentu	Aksi balas-membalas yang bersifat merugikan

Faktor/Unsur	Deskripsi Perang Dagang AS–Tiongkok	Kesesuaian dengan Elemen Konflik
3. Ketegangan yang Berkelanjutan	Berlangsung sejak 2018, belum terselesaikan sepenuhnya, hanya ada kesepakatan parsial (Phase I)	Konflik bersifat terus-menerus dan tidak selesai cepat
4. Dampak Multilateral/ Global	Negara ketiga seperti Indonesia terdampak; terjadi penurunan ekspor/impor dan perubahan rantai pasok global	Konflik berdampak internasional, bukan hanya bilateral
5. Unsur Strategis dan Politik	Berkaitan dengan dominasi teknologi, keamanan nasional, dan hegemoni global	Terdapat dimensi geopolitik dan bukan sekadar ekonomi
6. Intervensi Organisasi Internasional	WTO menjadi forum penyelesaian, seperti saat Tiongkok menggugat AS	Konflik diakui dan ditangani oleh lembaga internasional

**Tabel 2. Perang Dagang AS- Tiongkok sebagai Konflik (Crowley, 2019)**

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki tingkat ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi, namun pada nyatanya konflik tetap terjadi, dan bahkan terus berkembang. Penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam realitas hubungan internasional saat ini, ditambah dengan faktor-faktor seperti kekuasaan asimetris, yaitu ketidakseimbangan kapabilitas dan pengaruh antara negara adidaya dengan negara pesaingnya. Lalu Politik domestik, yang merupakan tekanan dari kelompok industri dan kepentingan elektoral di dalam negeri. Serta rivalitas hegemonik, yakni persaingan antara Amerika Serikat sebagai hegemon mapan dan Tiongkok sebagai kekuatan yang tengah bangkit, berbagai faktor ini telah berperan besar dalam membentuk dan memperparah konflik. Ketiga faktor ini juga yang mendorong negara untuk mengejar kepentingan strategis dalam jangka panjang, bahkan jika itu berarti mengorbankan stabilitas hubungan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana saling ketergantungan kompleks (*complex interdependence*) antara Amerika Serikat dan Tiongkok, di tengah perang dagang antara kedua negara di masa pemerintahan Donald Trump. Fenomena ini menantang klaim dasar teori interdependensi kompleks yang menyatakan bahwa saling ketergantungan ekonomi dapat menjadi penjamin adanya perdamaian. Justru, dalam kasus ini, ketergantungan tampak dimanfaatkan sebagai instrumen tekanan. Oleh karena itu, pendekatan teoritis lama perlu dikaji ulang dan dikomplementasi dengan pemahaman baru yang lebih realistis terhadap dinamika kekuasaan ekonomi global.

### Landasan Teoritik

Penelitian ini berangkat dari teori interdependensi kompleks yang dikembangkan oleh Keohane dan Nye, yang menjadi dasar dalam memahami dinamika hubungan antar negara di era globalisasi. Dalam karyanya, *Power and Interdependence* (1977), Keohane

dan Nye menekankan bahwa dalam dunia yang saling terhubung, negara-negara tidak hanya berinteraksi melalui jalur militer dan diplomatik, tetapi juga melalui hubungan ekonomi yang saling bergantung. (Nye, 2011) Teori ini memiliki tiga karakteristik utama: (1) adanya banyak saluran komunikasi antar negara, baik formal maupun informal, (2) tidak adanya hirarki yang tegas antar isu, sehingga isu ekonomi dapat setara pentingnya dengan isu keamanan, dan (3) penurunan efektivitas kekuatan militer sebagai alat utama dalam menyelesaikan konflik antar negara.

Namun, teori ini tidak selalu bisa menjelaskan kenyataan di lapangan. Misalnya, dalam kasus perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, meskipun kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat, konflik tetap terjadi dan bahkan semakin memanas. Untuk memahami hal ini, penelitian ini juga menggunakan konsep *asymmetric interdependence* yang masih berasal dari pemikiran Keohane dan Nye. Konsep ini menyatakan bahwa dalam hubungan saling ketergantungan, negara yang lebih sedikit bergantung justru memiliki posisi tawar yang lebih kuat, karena kerugiannya lebih kecil jika hubungan tersebut terganggu. Sebaliknya, negara yang lebih bergantung akan berada dalam posisi lemah karena lebih rentan terhadap tekanan ekonomi. Dengan kata lain, ketergantungan tidak selalu menciptakan perdamaian, tetapi bisa menjadi alat kekuasaan yang dimanfaatkan oleh negara yang lebih dominan dalam jaringan tersebut.

Selain itu, penulis juga menggunakan konsep *weaponized interdependence* yang telah dikembangkan oleh Farrel dan Newman pada tahun 2019. Konsep ini menjelaskan bahwa negara-negara yang menguasai hubungan dalam jaringan ekonomi global seperti sistem keuangan internasional, teknologi tinggi, dan infrastruktur digital dapat memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk dapat menekan negara lain. Keberhasilan dalam memanfaatkan interdependensi sebagai alat koersif bergantung pada beberapa faktor penting. Pertama, struktur jaringan global yang asimetris, dimana sebagian besar aliran informasi dan transaksi dikendalikan oleh segelintir titik penghubung utama. Kedua, kontrol yurisdiksi negara terhadap simpul-simpul tersebut. Ketiga, kemampuan institusi domestik untuk mengatur dan memaksa aktor privat seperti perusahaan teknologi atau perbankan agar mengikuti kepentingan strategis negara. Keempat, dukungan internasional atau kemampuan membangun koalisi untuk menegakkan tekanan tersebut secara efektif. Strategi ini dapat diwujudkan melalui dua mekanisme utama, yaitu *panopticon effect* atau yang kita kenal sebagai kemampuan untuk mengakses informasi strategis melalui aliran data. Dan *chokepoint effect* atau kemampuan untuk memutus akses negara sasaran dari sistem global yang vital (Newman, 2019).

Dalam konteks perang dagang AS– Tiongkok, *weaponized interdependence* tercermin dari tindakan Amerika Serikat yang membatasi akses Tiongkok terhadap teknologi tinggi dan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan strategis seperti Huawei. Hal ini menunjukkan bahwa interdependensi ekonomi tidak hanya menciptakan kerja sama, tetapi juga dapat dimanipulasi sebagai alat kekuasaan geopolitik. Dengan menggabungkan dua pendekatan, yaitu interdependensi kompleks dan *weaponized interdependence*, penelitian ini membangun kerangka konseptual yang lebih holistik dan realistis untuk menganalisis paradoks dalam perang dagang AS–Tiongkok. Kerangka ini tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dan saling ketergantungan antar negara, tetapi juga menyoroti bagaimana struktur jaringan global yang asimetris dapat dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan oleh negara-negara dominan. Dengan demikian, analisis ini mencakup tidak hanya hubungan kerja sama, tetapi juga potensi koersif dan manipulatif yang tersembunyi di balik interdependensi global.

<b>Teori/ Konsep</b>	<b>Aspek Kunci</b>	<b>Indikator Empiris</b>	<b>Contoh dalam Studi Kasus</b>
<b>Interdependensi Kompleks</b>	Banyak saluran hubungan	Intensitas perdagangan, investasi, dan diplomasi antara AS–Tiongkok	Perdagangan bilateral AS– Tiongkok mencapai triliunan USD pertahun
	Tidak ada hirarki isu	Isu ekonomi setara penting dengan isu keamanan dalam kebijakan luar negeri	Perang dagang menjadi isu utama dalam agenda diplomasi dan kampanye politik
	Penurunan efektivitas militer	Konflik diselesaikan melalui tarif, sanksi ekonomi, bukan konfrontasi militer	Tidak ada penggunaan kekuatan militer, hanya instrumen perdagangan
<b>Asymmetric Interdependence</b>	Ketimpangan ketergantungan antar negara	Negara lebih dominan lebih sedikit bergantung → punya <i>leverage</i> lebih besar	AS lebih mampu memberi tekanan karena Tiongkok, lebih tergantung pada pasar AS
<b>Weaponized Interdependence</b>	<i>Chokepoint effect</i> (pemutusan akses terhadap simpul penting)	Pembatasan akses ke teknologi penting atau infrastruktur ekonomi global	AS melarang ekspor chip semikonduktor dan teknologi ke Huawei
	<i>Panopticon effect</i> (pengawasan atas arus informasi strategis)	Kontrol atas aliran data global melalui perusahaan digital dan sistem keuangan global	AS dapat mengakses atau memblokir sistem informasi melalui Google, Apple, dll
	Kontrol simpul ekonomi global	Dominasi atas sistem keuangan internasional (SWIFT, USD), paten teknologi	AS menggunakan yurisdiksi finansial dan teknologi untuk menekan Tiongkok
	Tujuan koersif negara dominan	Tindakan ekonomi digunakan untuk tujuan geopolitik, bukan hanya ekonomi	AS menjatuhkan sanksi bukan hanya karena defisit, tapi juga karena isu keamanan nasional dan hegemonik

**Tabel 3. Hubungan Interdependensi Kompleks dengan weaponized interdependence**

Tabel di atas dibuat untuk membantu pembaca dalam memahami jembataan antara teori interdependensi kompleks, dengan dengan data tentang perang dagang AS-Tiongkok secara sistematis.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, sebagaimana dijelaskan dalam ragam penelitian kualitatif. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami secara intensif fenomena paradoks dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang tidak sesuai dengan teori interdependensi kompleks. Pendekatan ini bersifat fleksibel, alami, dan bertujuan menggali makna di balik kebijakan dan relasi ekonomi-politik kedua negara, sebagaimana karakteristik penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (Fiantika, 2022). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti artikel jurnal, laporan organisasi internasional, dan berita media internasional. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, yang melakukan seleksi dan interpretasi data berdasarkan pemahaman terhadap konteks historis dan politik yang melatarbelakangi konflik perdagangan tersebut. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memfokuskan informasi pada aspek interdependensi ekonomi dan dinamika konflik perdagangan. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis untuk memetakan pola-pola hubungan ekonomi dan ketegangan politik. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, untuk membangun pemahaman mendalam mengenai keterbatasan teori interdependensi dalam menjelaskan realitas konflik kontemporer. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai dokumen dan sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan. Dengan demikian, metodologi ini mendukung tujuan penelitian untuk memahami secara holistik dinamika paradoks antara ketergantungan ekonomi dan konflik dalam konteks perang dagang AS–Tiongkok.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa paradoks dalam teori interdependensi kompleks Keohane dan Nye terjadi dalam kasus perang dagang AS–Tiongkok. Walaupun terdapat tingkat ketergantungan ekonomi yang tinggi, kedua negara tetap terlibat dalam konflik terbuka, yang dimulai pada tahun 2018 dan terus berlanjut hingga era pemerintahan Joe Biden. Berdasarkan data OEC World (2024), ekspor yang dilakukan Tiongkok ke Amerika Serikat pada tahun 2023 mencapai US\$436 miliar, sektor yang didominasi produk sektor manufaktur seperti peralatan elektronik, komputer, dan barang-barang teknologi lainnya (World, 2024). Hal ini memperlihatkan adanya ketergantungan ekonomi yang kuat antara Amerika dan Tiongkok, terutama dari pihak Tiongkok terhadap pasar Amerika. Karena Meskipun Tiongkok telah berupaya mendiversifikasi pasar ekspornya, AS tetap menjadi mitra dagang utama, khususnya untuk produk manufaktur.

Ketergantungan Tiongkok pada pasar AS memberikan *leverage* bagi AS dalam hubungan perdagangan bilateral. AS dapat memberlakukan tarif atau pembatasan ekspor teknologi untuk menekan Tiongkok, sementara Tiongkok memiliki ruang gerak yang lebih terbatas karena ketergantungannya pada pasar AS. Penulis menemukan adanya paradoks dalam kejadian perang dagang antara Tiongkok dan juga AS. Selain itu, penulis juga merujuk pada buku dari karya *power Interdependence* oleh Keohane dan Nye, yang mengaskan bahwa teori interdependensi kompleks mengatakan bahwa negara-negara modern tidak hanya berinteraksi melalui konflik militer, tetapi juga melalui berbagai jaringan kerja sama ekonomi, diplomasi, dan institusi internasional. Hal ini dianggap tidak efektif untuk menyelesaikan perselisihan yang ada. Namun, pada kasus perang dagang AS–Tiongkok sejak 2018 menunjukkan sebaliknya. Meskipun

saling bergantung secara ekonomi, kedua negara terlibat dalam konfrontasi tarif, sanksi teknologi, dan upaya koersif lain yang mematahkan prediksi teori interdependensi kompleks. Oleh karena itu, perlu diteliti mengapa interdependensi kompleks yang seharusnya menciptakan perdamaian justru berujung konflik.

### **Keterbatasan Asumsi Dasar Teori Interdependensi Kompleks**

Keohane & Nye membayangkan bahwa ketika dua negara memiliki “*multiple channels*” misalnya perdagangan, investasi, dan diplomasi ekonomi, mereka akan menahan diri untuk berkonfrontasi, karena biaya ekonomi yang harus ditanggung keduanya terlalu tinggi. Namun, perang dagang AS–Tiongkok menunjukkan bahwa meski volume perdagangan bilateral mencapai ratusan miliar dolar, kedua pihak tetap berani menaikkan tarif dan memblokir akses teknologi (contoh: larangan AS terhadap Huawei). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin luas saluran ekonomi tidak selalu berarti jaringan itu digunakan untuk kerja sama, melainkan juga dapat menjadi medan persaingan koersif (Hawkins, 2024).

Asumsi kedua adalah “*the absence of hierarchy among issues*”, sehingga isu ekonomi memiliki bobot yang sama dengan isu keamanan. Dalam teori interdependensi kompleks, jika ekonomi diperlakukan setara keamanan, maka ekonomi akan menjadi alat diplomasi yang moderat. Namun, perang dagang belakangan ini menempatkan ekonomi menjadi senjata geopolitik AS dengan menggunakan kebijakan tarif dan sanksi teknologi atas dasar alasan keamanan nasional, seperti melindungi *IP address* dan menghambat kemajuan militer Tiongkok. Dengan kata lain, ekonomi dipergunakan untuk mencapai tujuan strategis, bukan sekadar memaksimalkan keuntungan bersama. Kemudian, Keohane dan Nye juga mengatakan bahwa peran militer telah menurun dalam konflik antar negara yang memiliki saling ketergantungan (interdependensi) tinggi.

Di satu sisi, perang dagang AS-Tiongkok tidak melibatkan mobilisasi militer secara langsung. Namun, penggunaan instrumen ekonomi, tarif bertingkat, sanksi finansial, dan pemblokiran akses teknologi. Juga menyebabkan dampak destruktif hampir setara konflik militer, terutama bagi sektor teknologi tinggi dan manufaktur Tiongkok. Dengan demikian, meski faktor militer tidak terlibat, konflik tetap bersifat koersif dan berisiko memicu eskalasi militer di ranah lain, misalnya konflik di Laut Tiongkok Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakterlibatan faktor militer formal bukan serta-merta menjamin stabilitas.

Lalu, teori interdependensi kompleks cenderung memfokuskan pada insentif ekonomi sebagai alat stabilisasi, namun mengabaikan sepenuhnya faktor-faktor politik domestik, rivalitas hegemonik, dan nasionalisme ekonomi yang dalam praktik nyata telah memicu konflik. Contohnya pada kebijakan Trump di tahun 2018 yang menekankan perlindungan industri domestik AS dan tekanan elektoral menjadi akar perang dagang, bukan semata-mata soal rasionalitas ekonomi sistematis. Demikian pula, kebijakan Biden tetap menitikberatkan pada pembatasan teknologi strategis demi alasan keamanan nasional, meski terkadang mengorbankan kepentingan ekonomi, diantaranya industri otomotif dan agrikultur AS.

### **Kritik terhadap Teori Interdependensi Kompleks dalam Kasus Perang Dagang AS-Tiongkok**

Teori interdependensi perlu diperbaharui kembali, karena tidak mampu menjelaskan realitas hubungan internasional masa kini yang dikarakterisasi oleh jaringan global yang sangat terintegrasi dan asimetris. Pertama, asumsi dasar teori klasik ini bahwa

interdependensi ekonomi akan selalu mendorong kerja sama dan menekan konflik terbukti tidak memadai ketika satu pihak dapat memanipulasi struktur jaringan untuk kepentingan koersif. Farrell dan Newman menggambarkan fenomena ini sebagai *weaponized interdependence*, yaitu pada saat negara dominan seperti Amerika Serikat menggunakan posisi sentralnya dalam jaringan global keuangan (misalnya SWIFT) atau teknologi semikonduktor dan infrastruktur digital untuk menekan lawan tanpa perlu melibatkan kekuatan militer secara langsung.

Kedua, kerangka interdependensi kompleks juga mengabaikan peran krusial politik domestik dan nasionalisme ekonomi yang mempengaruhi cara negara menggunakan jaringan antar negara. Dalam perang dagang AS–Tiongkok, misalnya, keputusan untuk mengenakan tarif tinggi dan melarang ekspor teknologi kepada Tiongkok tidak semata-mata didorong oleh kalkulasi ekonomi murni, melainkan juga oleh tekanan politik domestik seperti kebutuhan untuk meredam kekhawatiran pemilih, dan melindungi industri dalam negeri, serta rivalitas hegemonik yang lebih mendalam. Sehingga, ekonomi diperlakukan sebagai instrumen politik luar negeri. Karena teori lama gagal menjelaskan bagaimana nasionalisme ekonomi dan kepentingan politik domestik dapat memicu kebijakan koersif yang memanfaatkan interdependensi sebagai senjata pengaruh.

Ketiga, teori interdependensi kompleks klasik kurang memperhatikan kemampuan rezim internasional untuk beradaptasi, atau justru menjadi instrumen yang bersifat mengancam sistem internasional itu sendiri. Di sisi lain, lembaga multilateral seperti WTO atau JCPOA sering diharapkan mampu menengahi konflik ekonomi. Tetapi kenyataannya, rezim-rezim tersebut semakin terkikis atau bahkan diabaikan jika bertentangan dengan kepentingan strategis negara kuat. AS, misalnya, dengan mudah menarik diri dari JCPOA pada 2018 dan menerapkan sanksi sepihak yang berdampak pada perusahaan non-AS, (Beauchamp, 2018) menunjukkan bahwa rezim multilateral tidak selalu memiliki otoritas untuk menghadang penggunaan interdependensi kompleks sebagai senjata.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka baru seperti konsep yang dapat memadukan *insight* realistik tentang kekuasaan dan keamanan, wawasan liberal mengenai peran institusi, serta analisis struktur jaringan global yang menekankan letak simpul kritis dan yurisdiksi hukum. Lalu, kerangka tersebut juga harus memasukkan variabel politik domestik, yaitu nasionalisme, lobi industri, dan kepentingan electoral, serta memahami interdependensi kompleks digital melalui cloud, data, infrastruktur internet sebagai arena perjuangan koersif. Dengan demikian, teori baru perlu menjelaskan bagaimana interdependensi yang semula diasumsikan sebagai pilar perdamaian dapat berubah menjadi alat dominasi strategis oleh negara-negara yang menguasai simpul jaringan global.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan ekonomi yang sangat saling bergantung antara Amerika Serikat dan Tiongkok justru tidak mencegah munculnya konflik, melainkan menjadi penyebab bagi konfrontasi strategis. Dengan mengkaji kasus perang dagang AS–Tiongkok menggunakan teori interdependensi kompleks dan *weaponized interdependence*, ditemukan bahwa asumsi dasar teori liberal klasik tidak sepenuhnya relevan dalam konteks globalisasi kontemporer yang ditandai dengan asimetri kekuasaan dan politisasi jaringan global. Meskipun interdependensi kompleks menekankan pentingnya kerja sama, banyak saluran hubungan, dan minimnya peran militer, dalam kenyataannya perang dagang tetap terjadi, dan bahkan meningkat intensitasnya. Hal ini membuktikan adanya paradoks interdependensi, yaitu

ketergantungan yang tinggi tidak selalu membawa stabilitas, tetapi justru membuka peluang untuk dimanfaatkannya ketimpangan sebagai alat tekanan. Amerika Serikat, sebagai negara yang memiliki kontrol atas simpul jaringan global seperti sistem keuangan dan teknologi, memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk menekan Tiongkok secara sistematis. Hal ini tercermin dalam pelarangan terhadap Huawei, pembatasan ekspor semikonduktor, dan sanksi terhadap entitas ekonomi Tiongkok.

Dalam kerangka *weaponized interdependence*, sebagaimana dijelaskan oleh Farrell dan Newman, interdependensi tidak lagi netral, melainkan dapat dipersenjatai melalui dua mekanisme utama, yaitu *panopticon effect* atau pengawasan aliran informasi dan *chokepoint effect* atau pemutusan akses ke simpul jaringan. Dalam konteks perang dagang, kedua mekanisme ini digunakan secara aktif oleh AS, yang menjadikan interdependensi kompleks sebagai alat dominasi strategis. Hal ini menegaskan bahwa teori interdependensi kompleks perlu diperbaharui dengan pendekatan baru yang mampu menjelaskan dinamika koersif dalam struktur jaringan global yang asimetris. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya pengembangan kerangka analitis baru yang disebut *coercive complex interdependence*, yakni sebuah pendekatan yang menggabungkan perspektif liberal tentang jaringan dan kerja sama dengan dimensi realistik mengenai kekuasaan, kontrol jaringan, dan politik domestik. Kerangka ini diharapkan lebih mampu menjelaskan dinamika hubungan internasional di era globalisasi digital dan persaingan kekuatan besar, di saat interdependensi kompleks justru dapat menjadi alat tekanan yang efektif dalam pertarungan geopolitik global.

### Daftar Pustaka

- Beauchamp, Z. (2018). *Trump's withdrawal from the Iran nuclear deal, explained*. Vox.
- Bharadwaj, D. H. ((December 2022). Conflict and Conflict Resolution in International Relations,. *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 27, no. 12, 6–14.
- Crowley, M. A. (2019). *Trade War: The Clash of Economic Systems Endangering Global Prosperity*. London: CEPR Press.
- Dehn, J. ( 2020). The China Witch Hunt, The Emerging View. *London: Ashmore Investment Management*.
- Fiantika, F. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Hawkins, M. (2024). *Tech war: U.S. considers sanctions on Chinese chipmakers linked to Huawei*. Bloomberg Technoz.
- Newman, H. F. (2019). Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion. *International Security* , 42-79.
- Nye, R. O. (2011). *Power And Interdependence* . Boston : Pearson.

*Kritik atas Interdependensi Kompleks: Studi Kasus Perang Dagang AS–Tiongkok di Era  
Kepemimpinan Donald Trump*

Putri, I. E. (2024). The Role of the World Trade Organization ( WTO) on The Impact of the China-United Staes Trade war on International Trade. *Activa Yuris 4 No. 2*, 165-173.

World, O. (2024). "*China (CHN) and United States (USA) Trade*," *Observatory of Economic Complexity*. USA: OEC World.